RENCANA STRATEGIS

SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perencanaan 2025-2029 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah, yang memuat Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah memuat gambaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah yang menggambarkan 4 (empat) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah. Kami menyadari bahwa Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Dokumen Perencanaan ini di masa yang akan datang. Dengan tersusunnya Dokumen Perencanaan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Dokumen Perencanaan ini. Semoga Tuhan selalu menyertai segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Palangka Raya, Desember 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Tengah

Yuliawistina, S.T., M.P.W.K.
NIP. 197807162009012003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **9**
1.1. KONDISI UMUM 9
1.1.1. Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Tengah 9
1.1.2. Kondisi Umum Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 14
1.2. POTENSI PERMASALAHAN 17
1.2.1. Potensi 17
1.2.2. Permasalahan 18
1.2.3. Matriks S-W-O-T dalam Menghadapi Pelaksanaan Program 20
1.2.4. Isu Strategis Penyediaan Perumahan di Provinsi Kalimantan Tengah 22
BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN **24**
2.1. TUJUAN 24
2.2. SASARAN PROGRAM 25
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN **29**
3.1. ARAH KEBIJAKAN UNIT ORGANISASI 29
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal 29
3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 30
3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 31
3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 33
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 34
3.2.1. Arahan Kebijakan 34
3.2.2. Strategi Pelaksanaan 35
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN 36
3.3.1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 38
3.3.2. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Sekretariat Jenderal 43
3.3.3. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 43
3.3.4. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 45

3.3.5. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 46
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 48
4.1. TARGET KINERJA 48
4.2. KERANGKA PENDANAAN 52
BAB 5 PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 10
Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 11
Tabel 1. 3 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 11
Tabel 1. 4 Target Capaian Indikator Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 – 2024 14
Tabel 1. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020–2024 Terhadap Dokumen Perencanaan/Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 16
Tabel 1. 6 Potensi di Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 17
Tabel 1. 7 Permasalahan di Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 19
Tabel 1. 8 Matriks SWOT dalam Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Konteks di Provinsi Kalimantan Tengah 21
Tabel 1. 9 Isu Strategis Penyediaan Perumahan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 22

Tabel 3. 1 Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 38
Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan 40
Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 41
Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 42
Tabel 3. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender 42
Tabel 3. 6 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 43
Tabel 3. 7 Pegawai Outsourcing Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 43
Tabel 3. 8 Tenaga Ahli Pendampingan Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 44
Tabel 3. 9 Koordinator Kabupaten Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan . 44
Tabel 3. 10 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 44

Tabel 3. 11 Tenaga Ahli Pendampingan Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 45
Tabel 3. 12 Koordinator Kota Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 45
Tabel 3. 13 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan..... 46
Tabel 3. 14 Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.... 46

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Matriks Target Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 48
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah 10
Gambar 1. 2 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023 12
Gambar 1. 3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 .. 13
Gambar 1. 4 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024 13
Gambar 1. 5 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Terakses Sanitasi Aman Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024 14

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 38
Gambar 3. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 40
Gambar 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 40
Gambar 3. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 41
Gambar 3. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 42
Gambar 3. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender..... 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 – 2029 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 60
Lampiran 2 Metode Perhitungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 64

BAB 1
PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sejalan dengan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Pemerintah melalui Asta Cita ke-6 berkomitmen untuk membangun dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) dipecah fungsinya menjadi dua kementerian baru, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Kementerian ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Unit Kerja di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.1.1. Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia sejak 2022 dengan luas 153.564,50 km². Berdasarkan Data Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan 2024 mencatat penduduk provinsi ini berjumlah 2.784.971 jiwa. Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota yang dibagi dalam wilayah administrasi berdasarkan pada peta di bawah ini.

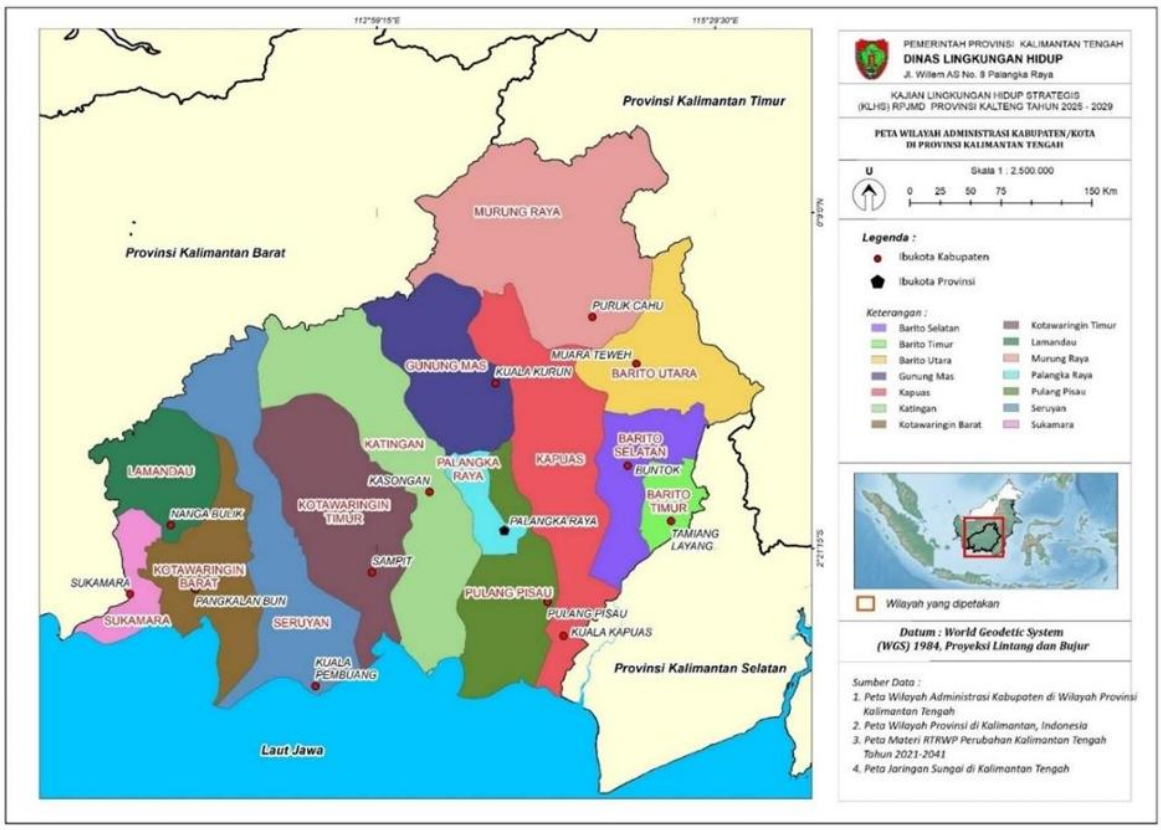

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

Dalam merumuskan Dokumen Perencanaan memerlukan data-data di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang digunakan sebagai bahan dalam merumuskan Dokumen Perencanaan Satruan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	2022		Tingkat Realisasi (%)	Interprestasi
				Target	Realisasi		
1.	Persentase Rumah Layak Huni (%)	%	54,41	60,00	55,34	92,23	Belum Tercapai
2.	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1: 7,01	1:6,40	1:7,00	100,93	Melampaui
3.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,051	0,000	0,051	0,000	Tidak Bisa Dinilai
4.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh yang Ditangani (%)	%	1,190	2,000	1,190	59,500	Belum Tercapai
5.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Ditangani (%)	%	3,030	6,000	3,030	50,500	Belum Tercapai

6.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	%	100	100	100	100,00	Tercapai
7.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	%	100	100	100	100,00	Tercapai

Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	2023		Tingkat Realisasi (%)	Interprestasi
				Target	Realisasi		
1.	Persentase Rumah Layak Huni (%)	%	55,34	65,46	54,07	82,60	Belum Tercapai
2.	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:7,00	1:5,80	1:7,20	102,08	Melampaui
3.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,0510	0,0511	0,0510	0,2000	Belum Tercapai
4.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh yang Ditangani (%)	%	1,190	3,571	2,381	66,68	Belum Tercapai
5.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Ditangani (%)	%	3,030	9,091	6,061	66,67	Belum Tercapai
6.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	%	100	100	100	100,00	Tercapai
7.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	%	100	100	100	100,00	Tercapai

Tabel 1. 3 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023	2024		Tingkat Realisasi (%)	Interprestasi
				Target	Realisasi		
1.	Persentase Rumah Layak Huni (%)	%	54,07	70,98	56,49	79,59	Belum Tercapai
2.	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:7,20	1:5,37	1:6,44	101,64	Melampaui
3.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,0510	0,0511	0,0510	0,2000	Belum Tercapai
4.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh yang Ditangani (%)	%	2,381	4,762	10,133	212,79	Melampaui
5.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Ditangani (%)	%	6,061	12,121	25,794	212,80	Melampaui

6.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	%	100	100	100	100,00	Tercapai
7.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	%	100	100	100	100,00	Tercapai

A. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Berdasarkan data yang di olah dari BPS, Susenas tahun 2020, jumlah RLH di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 366.112 Unit (51,97%) yang mengindikasikan masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH). Data tersebut dihitung berdasarkan 4 indikator yakni ketahanan bangunan, luasan bangunan, akses air minum dan akses sanitasi. Persentase RLH ini didapat berdasarkan rumus jumlah RLH dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Indonesia tahun 2023 sebesar 63,15%. Oleh karenanya capaian RLH di Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun terakhir (2019-2023) masih berada di bawah capaian nasional.

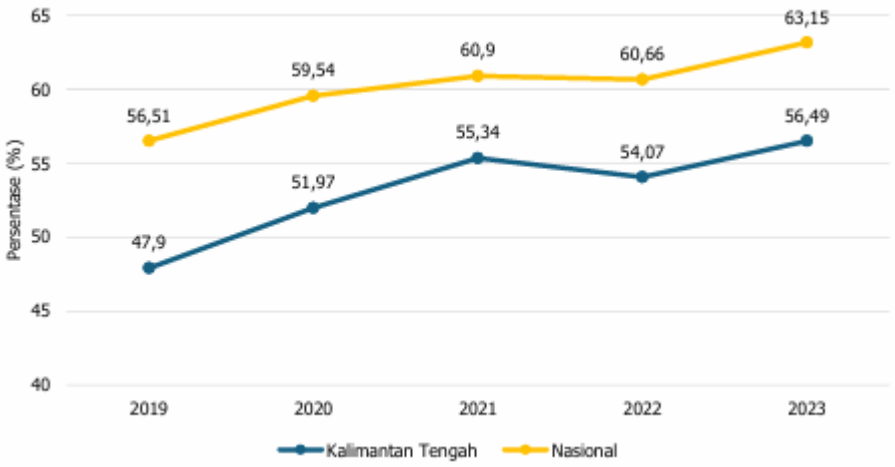

Gambar 1. 2 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah cukup fluktuatif. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri mencapai 325.892 unit (45,93%) pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 312.409 unit (44,66%). Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 43,51%. Secara keseluruhan jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2019.

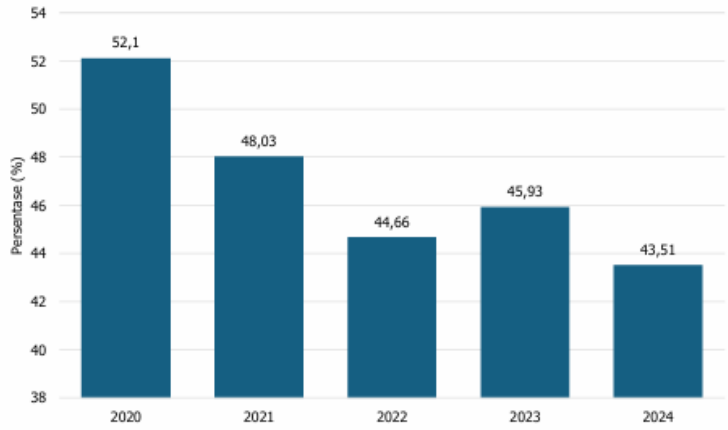

Gambar 1. 3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

B. Akses Sanitasi Masyarakat

Ketersediaan sanitasi yang layak dan aman merupakan indikator penting dalam pembangunan permukiman sehat dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir (2020-2025) mengalami peningkatan tren terkait rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Konsep sanitasi layak sendiri sejak tahun 2018 mengalami perubahan yang mengedepankan aspek dasar kelayakan prasarana dasar kesehatan, yaitu memiliki fasilitas BAB sendiri atau bersama, kloset leher angka dan TPAT tangki septik/IPAL. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan dari 72,31% pada tahun 2020 meningkat menjadi 78,15% persen tahun 2024. Namun, capaian angka akses sanitasi layak Kalimantan Tengah ternyata masih jauh di bawah rata-rata nasional. Per tahun 2024, rata-rata nasional terhadap persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak telah mencapai 83,6% disaat Provinsi Kalimantan Tengah baru mencapai 78,15%.

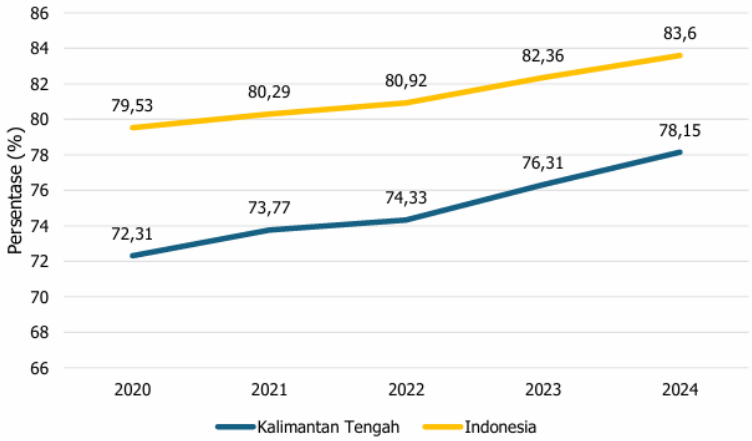

Gambar 1. 4 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Namun, jika ditinjau dari indikator akses terhadap sanitasi aman, yaitu sanitasi yang tidak hanya layak tetapi juga memastikan bahwa limbah domestik diolah atau dibuang secara

aman dan tidak mencemari lingkungan, maka capaian Kalimantan Tengah masih sangat rendah dan fluktuatif. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman hanya mencapai 5,26% pada tahun 2020, bahkan sempat menurun menjadi 4,18% di tahun 2021. Kendati sempat melonjak signifikan menjadi 13,96% pada tahun 2022, capaian tersebut kembali menurun menjadi 11,16% pada tahun 2023 dan 11,07% pada tahun 2024. Walaupun demikian, capaian Kalimantan Tengah pada 3 tahun terakhir (2022-2024) berada diatas capaian Nasional.

Data ini menunjukkan bahwa peningkatan sanitasi di Kalimantan Tengah masih lebih berfokus pada perluasan cakupan sanitasi layak, namun belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas sistem pengolahan limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan. Rendahnya capaian sanitasi aman juga menunjukkan bahwa sebagian besar limbah rumah tangga masih belum dikelola secara aman, sehingga berpotensi mencemari sumber daya air dan lingkungan sekitar, serta berdampak pada kesehatan masyarakat.

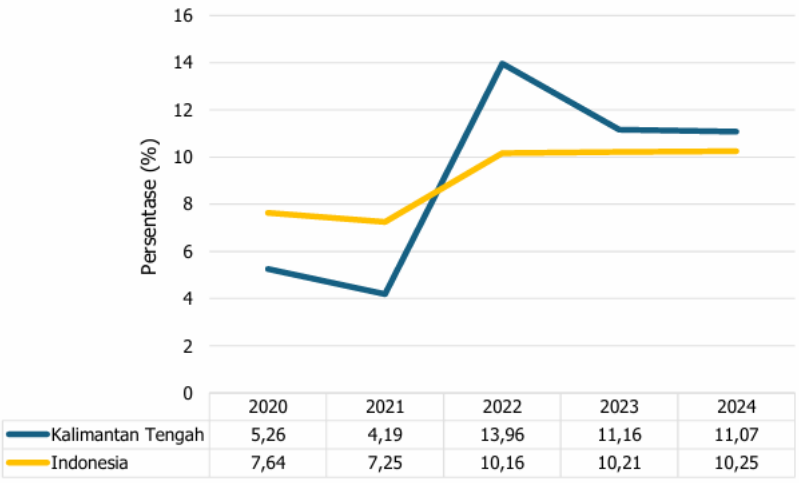

	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Tengah	5,26	4,19	13,96	11,16	11,07
Indonesia	7,64	7,25	10,16	10,21	10,25

Gambar 1. 5 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Terakses Sanitasi Aman Kalimantan Tengah dengan Indonesia Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik

1.1.2. Kondisi Umum Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Sebelum terbentuknya Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nama Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2020 sampai dengan 2024, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki target capaian sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Target Capaian Indikator Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 – 2024

KEGIATAN		SATUAN	TARGET					CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Kegiatan: Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman												
1	Perencanaan Penyediaan Perumahan	Dokumen	1	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2	Jumlah Rumah Umum yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	Unit	-	500	688	875	1,110	**-**	**321**	**540**	**513**	**63**
3	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	4.000	1.050	1.080	1.620	1.870	**3.999**	**750**	**1.262**	**932**	**498**
4	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	-	16	40	40	40	**-**	**19**	**-**	**1**	**-**
5	Jumlah Rumah Khusus yang Dipelihara dan Dirawat	Unit	-	-	30	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	Unit	-	132	212	263	223	**-**	**131**	**-**	**43**	**87**
7	Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara dan Dirawat	Tower	-	3	10	10	8	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan												
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Capaian kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sampai dengan 2024 secara umum telah berjalan secara optimal dan selaras dengan target yang ditetapkan dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja.

Untuk Program Dukungan Manajemen tercapai sebesar 86,67% sedangkan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Kegiatan Perencanaan Penyediaan Perumahan tercapai 100%, Kegiatan Rumah Umum yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU sebesar 45,29%, Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebesar 77,35%, Kegiatan Rumah Khusus yang Dipelihara dan Dirawat sebesar 0%, Kegiatan Rumah Susun yang Dibangun sebesar 31,45% dan Kegiatan Rumah Susun yang Dipelihara dan Dirawat sebesar 3,23%.

Tabel 1. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020–2024 Terhadap Dokumen Perencanaan/Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
Kegiatan: Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman																	
1.	Perencanaan Penyediaan Perumahan	Dokumen	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah Rumah Umum yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	Unit	0	0	0	500	321	64,20	688	540	78,49	875	513	58,63	1.110	63	5,68
3	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	4.000	3.999	99,98	1.050	750	71,43	1.080	1.262	116,85	1.620	932	57,53	1.870	498	26,63
4	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	0	0	0	16	19	118,75	40	0	0	40	1	2,50	0	0	0
5	Jumlah Rumah Khusus yang Dipelihara dan Dirawat	Unit	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	Unit	0	0	0	132	131	99,24	212	0	0	263	43	16,35	223	87	39,01
7	Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara dan Dirawat	Unit	0	0	0	3	0	0	10	1	0	10	0	0	8	0	0
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																	
Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan																	
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam hal ini Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah harus bergerak secara cepat dan optimal dengan memanfaatkan potensi untuk menghadapi permasalahan yang ada. Potensi dan permasalahan tersebut dikemukakan berikut ini.

1.2.1. Potensi

Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, disebutkan beberapa potensi berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dapat dilihat pada **Tabel 1.6**.

Tabel 1. 6 Potensi di Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Aspek	Uraian Potensi
1.	Ketersediaan Lahan dan Pengembangan Wilayah	Ketersediaan lahan yang relatif luas memberikan peluang pengembangan kawasan hunian dan permukiman baru yang terencana, terutama pada wilayah pengembangan strategis dan kawasan perkotaan baru.
2.	Kebijakan dan Perencanaan Perumahan	Adanya arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dalam RPJMD serta dokumen perencanaan sektoral menjadi landasan pengembangan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
3.	Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Peluang peningkatan kualitas permukiman melalui pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), termasuk jalan lingkungan, drainase, air minum, dan sanitasi.
4.	Program Penanganan Kawasan Kumuh	Tersedianya program penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
5.	Penguatan Sistem Sanitasi	Peluang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan persampahan melalui pendekatan kawasan, regional, dan berbasis masyarakat.
6.	Dukungan Pendanaan dan Kolaborasi	Potensi optimalisasi pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman melalui sinergi APBD, APBN, dana desa, sektor swasta, dan skema pembiayaan alternatif.
7.	Pengembangan Permukiman Berbasis Tata Ruang	Peluang integrasi pembangunan perumahan dan permukiman dengan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan pola permukiman yang tertata, aman, dan berkelanjutan.

8.	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pengembangan perumahan dan permukiman menjadi instrumen strategis dalam peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan penguatan daya saing wilayah.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang signifikan dalam pengembangan hunian, perumahan, kawasan permukiman, dan sistem sanitasi, yang ditopang oleh ketersediaan lahan yang relatif luas, struktur ruang wilayah yang berkembang, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan sektor perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar.

Ketersediaan ruang wilayah memberikan peluang bagi pengembangan kawasan hunian baru yang terencana, sekaligus mendukung penataan kawasan permukiman eksisting. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan sektoral yang selaras dengan kebijakan nasional menjadi landasan strategis dalam pengembangan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Program penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) menunjukkan potensi peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara bertahap dan terintegrasi.

Dalam aspek sanitasi, terdapat peluang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan persampahan melalui pendekatan kawasan, regional, dan berbasis masyarakat, yang dapat diintegrasikan dengan pengembangan kawasan permukiman. Selain itu, potensi penguatan kolaborasi pendanaan melalui sinergi APBD, APBN, dana desa, serta keterlibatan sektor swasta dan skema pembiayaan inovatif membuka peluang percepatan pembangunan perumahan dan permukiman.

Integrasi pembangunan perumahan dan permukiman dengan kebijakan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi faktor strategis dalam mewujudkan pola permukiman yang tertata, aman, dan berwawasan lingkungan. Dengan memanfaatkan keunggulan spasial, dukungan kebijakan pembangunan, serta kolaborasi lintas sektor, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki modal dasar yang kuat untuk mewujudkan sistem hunian dan permukiman yang inklusif, layak, dan berkelanjutan, guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing wilayah.

1.2.2. Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 disebutkan capaian Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2020 hingga 2024 menunjukan peningkatan setiap tahunnya dalam pemenuhan rumah tangga dengan akses hunian layaki dan askes sanitasi masyarakat. Meskipun capaian ini positif, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan utama, antara lain:

Tabel 1. 7 Permasalahan di Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Aspek	Uraian Permasalahan
1.	Kualitas Hunian	Sebagian hunian belum memenuhi standar teknis dan kesehatan, ditandai dengan keberadaan rumah tidak layak huni, kepadatan bangunan, serta keterbatasan akses terhadap prasarana dasar.
2.	Backlog dan Keterjangkauan Perumahan	Tingginya backlog perumahan yaitu sebesar 268.212 unit dan keterbatasan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian layak.
3.	Kawasan Kumuh	Keberadaan kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan masih menjadi persoalan struktural, dipengaruhi oleh urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.
4.	Akses Infrastruktur Permukiman	Keterbatasan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman, termasuk air minum layak, drainase, dan jaringan jalan lingkungan.
5.	Sanitasi dan Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah domestik belum optimal; sebagian masyarakat masih menggunakan sistem sanitasi tidak layak, serta rendahnya cakupan layanan sanitasi aman.
6.	Pengelolaan Persampahan	Kinerja pengelolaan persampahan belum optimal, ditandai dengan keterbatasan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R).
7.	Pendanaan dan Kapasitas Fiskal	Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah.
8.	Tata Kelola dan Kelembagaan	Koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam penanganan perumahan dan permukiman belum optimal, serta keterbatasan data dan sistem informasi sektoral yang terintegrasi.
9.	Tekanan Lingkungan dan Risiko Bencana	Kerentanan kawasan permukiman terhadap banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi lingkungan yang berdampak pada kualitas hunian dan keberlanjutan permukiman.
10.	Ketimpangan Antarwilayah	Disparitas kualitas perumahan dan permukiman antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih tinggi, mencerminkan ketimpangan akses layanan dasar dan infrastruktur.

Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dalam penyelenggaraan hunian, perumahan, kawasan permukiman, dan sanitasi, yang tercermin pada kesenjangan antara kebutuhan hunian layak dengan ketersediaan perumahan, kualitas lingkungan permukiman, serta keterjangkauan akses terhadap infrastruktur dasar. Secara umum, kualitas hunian di kedua provinsi belum sepenuhnya memenuhi standar teknis, kesehatan, dan keselamatan bangunan. Keberadaan rumah tidak layak huni,

kepadatan bangunan di kawasan tertentu, serta keterbatasan akses terhadap air minum layak, sanitasi dan prasarana dasar permukiman masih menjadi persoalan utama. Tingginya backlog perumahan dan keterbatasan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memperkuat kesenjangan akses terhadap hunian layak dan terjangkau.

Permasalahan kawasan kumuh masih signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, keterbatasan pengendalian pemanfaatan ruang, serta lemahnya penyediaan infrastruktur permukiman. Ketimpangan kualitas perumahan dan permukiman antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, menunjukkan belum meratanya akses layanan dasar dan infrastruktur permukiman.

Dalam aspek sanitasi, sistem pengelolaan air limbah domestik dan persampahan belum optimal. Rendahnya cakupan layanan sanitasi aman, keterbatasan fasilitas pengolahan air limbah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan berdampak pada degradasi kualitas lingkungan permukiman. Kondisi tersebut diperparah oleh kerentanan wilayah terhadap risiko lingkungan dan bencana, seperti banjir dan degradasi lahan, yang berdampak langsung pada keberlanjutan kawasan permukiman.

Dari sisi pendanaan dan tata kelola, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ketergantungan pada pembiayaan pemerintah, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif menjadi kendala dalam percepatan pembangunan perumahan dan permukiman. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan yang belum optimal, serta keterbatasan data dan sistem informasi perumahan dan permukiman yang terintegrasi, turut menghambat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Dengan demikian, permasalahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kualitas tata kelola, percepatan pembangunan infrastruktur dasar permukiman, serta optimalisasi pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor, guna mewujudkan sistem perumahan dan permukiman yang layak, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2.3. Matriks S-W-O-T dalam Menghadapi Pelaksanaan Program

Pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang luas, sebaran penduduk yang tidak merata, serta dinamika pertumbuhan kawasan perkotaan dan perdesaan. Ketersediaan lahan yang relatif luas dan dukungan kebijakan pembangunan menjadi potensi utama, namun masih dihadapkan pada permasalahan backlog perumahan, kualitas hunian yang belum memadai, keterbatasan layanan dasar permukiman, serta risiko lingkungan pada wilayah rawa dan gambut.

Dalam konteks tersebut, matriks SWOT merupakan hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman. Matriks ini dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, dan prioritas program pembangunan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang dapt dilihat pada **Tabel 1.8**.

Tabel 1. 8 Matriks SWOT dalam Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Konteks di Provinsi Kalimantan Tengah

STRENGTHS (S)	
S1.	Ketersediaan lahan yang relatif luas untuk pengembangan perumahan dan permukiman.
S2.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang (RPJMD, RTRW, RDTR, RP3KP, RISPAM, SSK).
S3.	Dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah.
S4.	Potensi kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN/BUMD, dan masyarakat.
S5.	Posisi strategis wilayah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi regional.
WEAKNESSES (W)	
W1.	Tingginya backlog perumahan dan rumah tidak layak huni.
W2.	Cakupan layanan air minum, sanitasi, dan persampahan yang belum merata.
W3.	Koordinasi lintas sektor dan lintas OPD yang belum optimal.
W4.	Keterbatasan data perumahan dan permukiman yang terintegrasi dan mutakhir.
W5.	Ketergantungan pada APBD/APBN dan terbatasnya pembiayaan alternatif.
W6.	Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.
OPPURTUNITIES (O)	
O1.	Prioritas nasional pada pembangunan perumahan layak dan penanganan kawasan kumuh.
O2.	Pertumbuhan pusat-pusat ekonomi dan kawasan strategis wilayah.
O3.	Peluang penerapan skema pembiayaan inovatif (KPBU, blended financing, CSR, dana desa).
O4.	Perkembangan teknologi digital dalam perencanaan dan pendataan.
O5.	Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang meningkatkan kebutuhan hunian
THREATS (T)	
T1.	Risiko lingkungan (banjir, kebakaran lahan, degradasi lingkungan, perubahan iklim).
T2.	Konflik lahan dan ketidakpastian status pertanahan.
T3.	Kenaikan harga lahan dan rumah yang menurunkan keterjangkauan hunian.
T4.	Disparitas kualitas permukiman antar wilayah.
T5.	Tumpang tindih regulasi dan kompleksitas perizinan

Matriks SWOT menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan internal dan tantangan eksternal. Optimalisasi potensi lahan, dukungan kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor perlu diimbangi dengan penguatan tata

kelola, pemerataan layanan dasar, pengendalian tata ruang, serta mitigasi risiko lingkungan. Matriks tersebut menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan dan program bidang perumahan dan kawasan permukiman, guna mendorong terwujudnya hunian layak, kawasan permukiman yang tertata, serta pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2.4. Isu Strategis Penyediaan Perumahan di Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 terdapat permasalahan di bidang perumahan dan permukiman berupa kurang meratanya penyediaan dan pengembangan kawasan permukiman, khususnya dalam capaian rumah layak huni.di samping itu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga memiliki hambatan untuk memiliki atau mengakses hunian di tengah kenaikan harga lahan atau rumah. Di samping itu, sarana pendukung seperti akses sanitasi dan air minum yang aman juga menjadi isu utama terkait dengan permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1. 9 Isu Strategis Penyediaan Perumahan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pengentasan rumah tidak layak huni yang belum optimal	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum pada kawasan permukiman yang belum optimal	
	Belum terintegrasinya penyelenggaraan penataan, rehabilitasi, dan peremajaan kawasan kumuh	
	Skor akses sanitasi dan air minum aman yang belum terpenuhi cukup tinggi	
Perlunya opsi bauran pendanaan untuk penyediaan perumahan bagi MBR	Masih tingginya backlog perumahan	
	Keterbatasan akses MBR dalam sektor informal untuk pembiayaan perumahan	
	Kenaikan harga lahan dan rumah	
	Belum sesuainya bantuan dalam kemudahan memperoleh rumah dengan profil dan karakteristik MBR	

BAB 2
TUJUAN DAN SASARAN

BAB 2
TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden memiliki misi yaitu delapan Asta Cita. Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025– 2029, Kementerian menjadi penyokong utama Asta Cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029. Selain menyokong Asta Cita Nomor 6 menjadi Misi Kementerian, Kementerian juga mendukung terlaksananya Asta Cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan dua tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian selama periode 2025–2029. Masing-masing tujuan tersebut disertai dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Sebagaimana terlampir pada tujuan satuan kerja dikemukakan berikut ini.

a. Tujuan Pertama

   “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”. Tujuan Pertama ini memiliki indikator:

   1) Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
   2) Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
   3) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas; dan
   4) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni.

b. Tujuan Kedua

   “Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan 2 (dua) tujuan di atas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk dalam rangka mendukung Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, maka penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja mengacu pada tugas dan fungsi Balai P3KP selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh selama periode 2025 - 2029 agar efektif, efisien, dan akuntabel maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029;
b. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029;
c. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029;
d. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 - 2029;
e. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 - 2029; dan
f. Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025 - 2029.

2.2. SASARAN PROGRAM

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 4 (empat) Sasaran Program yang akan dijabarkan kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan yaitu:

a. Sasaran Program 1 yaitu Meningkatnya Hunian Layak

Kegiatan 1 Penyelenggaraan Sistem dan Strategi dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSK 1 - Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni;
2. IKSK 2 - Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. IKSK 3 - Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan 2 Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSK 1 - Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU;

2. IKSK 2 - Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
3. IKSK 3 - Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertical; dan
4. IKSK 4 - Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Kegiatan 3 Penyediaan Rumah Layak Huni dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya ketersediaan layak huni dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSK 1 - Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
2. IKSK 2 - Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru; dan
3. IKSK 3 - Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman.

Kegiatan 4 Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSK 1 - Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau.

b. Sasaran Program 2 yaitu Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh

Kegiatan 1 Penanganan Permukiman Kumuh dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSK 1 - Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.

c. Sasaran Program 3 yaitu Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Kegiatan 1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) yaitu:

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSK 1 - Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman.

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSK 1 - Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel.

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSK 1 - Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

d. Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satiam Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan 1 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah derngan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSK 1 – Tingkat layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN UNIT ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Arah kebijakan unit organisasi dalam pembahasan ini meliputi 4 (empat) unit organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian PKP melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

1) **Penguatan Perencanaan dan Penganggaran**, melalui strategi:
   a) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
   b) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluating kegiatan.
2) **Transformasi Digital dan Tata Kelola**, melalui strategi:
   a) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
   b) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
3) **Penguatan Sumber Daya Manusia**, melalui strategi:
   a) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi;
   b) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
   c) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
4) **Penguatan Sistem Informasi dan Data**, melalui strategi:
   a) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia; dan

b) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).

5) **Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen**, melalui strategi:
   a) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
   b) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
6) **Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum**, melalui strategi:
   a) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
   b) Digitalisasi dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
7) **Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN**, melalui strategi:
   a) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
   b) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
8) **Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa**, melalui strategi:
   a) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
   b) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
9) **Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik**, melalui strategi:
   a) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis TI, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
   b) Kolaborasi lintas K/L dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
10) **Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif**, melalui strategi:
   a) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
   b) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman meliputi:

1) **Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan,** dilakukan dengan menerapkan strategi:
   a) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;

b) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
c) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
d) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal.

2) **Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif,** dilakukan dengan menerapkan strategi:
a) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif
b) seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
c) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
d) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.

3) **Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu,** dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.

4) **Menguatkan ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak,** dilakukan dengan menerapkan strategi:
a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b) Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
c) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
e) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
f) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan meliputi:

1) **Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan**, dengan strategi:
a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;

c) Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perdesaan;
d) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
e) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.

2) **Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif,** dengan strategi:
a) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
b) Pengembangan skema tabungan berencana;
c) Pengembangan bantuan tunai/*in-kind* yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
d) Pengembangan skema Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR);
e) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
f) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.

3) **Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi,** dengan strategi:
a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
b) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
c) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
d) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
e) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
f) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
g) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.

4) **Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan**, dengan strategi:
   a) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
   b) Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
   c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
   d) Pelaksanaan koordinasi antar *stakeholder* terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
   e) Penguatan kelembagaan.

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan meliputi:

1) **Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan**, dengan strategi:
   a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
   b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
   c) Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perkotaan; dan
   d) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2) **Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal**, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu (*mixed-use*, TOD).
3) **Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD),** dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
4) **Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan**, dengan strategi:
   a) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;

b) Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
d) Pelaksanaan koordinasi antar *stakeholder* terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
e) Penguatan kelembagaan.

5) **Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota**, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan.
6) **Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR**, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan *non-bank*.
7) **Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital**, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
8) **Percepatan penghunian**, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3.2.1. Arahan Kebijakan

Sejalan dengan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dimuat dalam dokumen RPJMN 2025-2029, RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian PKP 2025-2029, dan Renstra dari masing-masing Unit Organisasi (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan), arah kebijakan penyelenggaraan perumahan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam hal ini Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah meneruskan dari rumusan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Fokus utama diarahkan pada percepatan penyediaan hunian yang terjangkau, penyelesaian backlog perumahan, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Arah kebijakan tersebut meliputi:

a. Penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau untuk mendukung pencapaian target nasional melalui penyediaan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus) dan fasilitasi pembiayaan atau stimulan rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pekerja, komunitas, serta masyarakat terdampak bencana di Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Peningkatan kualitas permukiman dan pengurangan kawasan kumuh dengan melakukan intervensi fisik terpadu pada kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan guna mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman dan berkelanjutan;
c. Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dengan mendorong kolaborasi bersama pengembang perumahan melalui dukungan stimulan PSU baik berupa jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan/atau air bersih untuk kawasan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
d. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan reformasi kinerja guna mewujudkan manajemen pelaksanaan yang transparan, tepat mutu, tepat waktu, serta mengoptimalkan layanan Barang Milik Negara (BMN) di lingkup Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2.2. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik. Dengan pendekatan menyeluruh, Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk merealisasikan arah kebijakan di atas dan menjawab target *output* serta *outcome* yang ditetapkan dalam matriks kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

a. Strategi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
    1) Pembangunan Rumah Baru berupa Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus baik di wilayah Perdesaan maupun Perkotaan; dan
    2) Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Penyediaan Sanitasi Layak di wilayah Perdesaan maupun Perkotaan.

b. Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman
   1) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan pada hunian tapak dan/vertikal di wilayah perdesan maupun perkotaan; dan
   2) Peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

c. Strategi Tata Kelola dan Manajemen Internal
   1) Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan cara mempercepat proses serah terima aset atau hibah BMN hasil pembangunan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah baik berupa pembangunan rumah susun atau rumah khusus serta pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah atau Yayasan/Kementerian/Lembaga terkait agar aset dapat segera dikelola, dipelihara dan dimanfaatkan;
   2) Pengendalian mutu dan reformasi kinerja dengan melakukan pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan ndi lapangan guna menjamin ketepatan mutu, ketepatan waktu dan ketepatan kualitas serta memenuhi capaian jumlah layanan sebagai kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah; dan
   3) Sinergi dan kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan, termasuk melalui program CSR dan TJSL, untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Tiga Juta Rumah serta membangun koordinasi aktif dengan stakeholders terkait baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lainnya guna mempercepat uirusan terkait perizinan, legalitas serta dukungan sarana dan prasarana terkait Penyediaan Perumahan. Sinergi dan kolaborasi juga dapat berupa pendampingan dan pengawasan bersama Aparat Penegak Hukum.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam membantu tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I khususnya dalam hal pelaksanaan Pembangunan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman serta penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial di Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, maka dibentuklah Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I dan mengampu kegiatan dari 4 (empat) Unit Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Secara struktur internal, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran.

Susunan organisasi inti Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

1) Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

   Tugas Utama: Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, memberikan supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, mengawasi penatausahaan dokumen, serta menyusun laporan keuangan dan kinerja.

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

   Terdapat 4 (Empat) PPK dalam kelembagaan Satuan Kerja yang dibagi berdasarkan lingkup tugasnya:

   a. PPK Perencanaan dan Pengendalian;
   b. PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman;
   c. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
   d. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus.

   Tugas PPK: Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak, serta menguji kebenaran tagihan kepada negara.

3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

   Bertugas menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya, membebankan tagihan pada mata anggaran, dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

4) Bendahara Pengeluaran

   Bendahara Pengeluaran: Bertugas menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga, melakukan pemotongan pajak, serta melakukan pembayaran atas perintah PPK setelah pengujian ketersediaan dana.

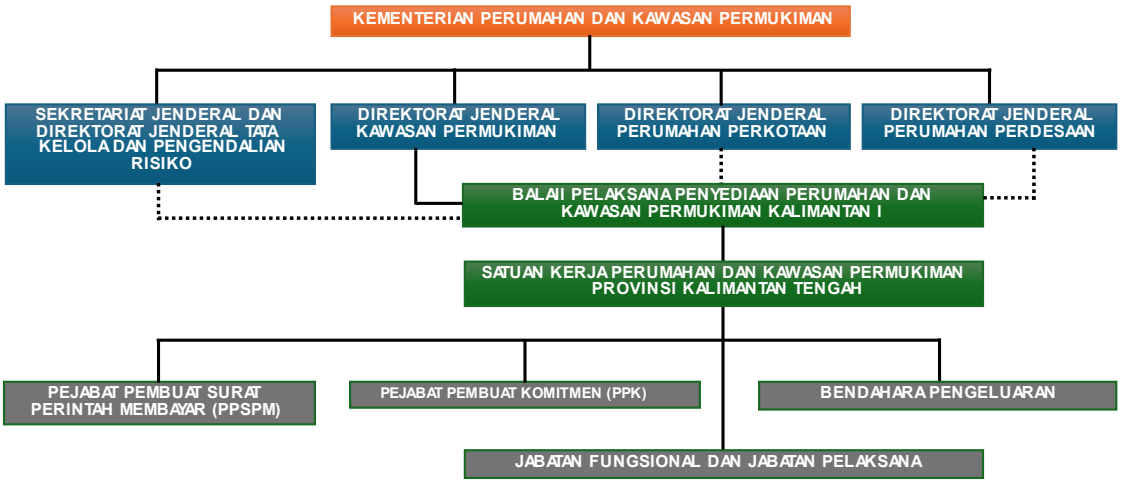

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

3.3.1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kapasitas yang terdiri atas sumber daya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang bebannya semakin bertambah setiap tahunnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, dan SDM pada dasarnya merupakan aset yang berfungsi sebagai modal di dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan, target, sasaran, dan dapat mewujudkan eksistensi organisasi.

Berdasarkan data kepegawaian Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah, total Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 adalah 18 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Status Pegawai	Gol	Usia (Tahun)	Pendidikan
1.	Yuli Kristina, S.T., M.P.W.K.	Kepala Satuan Kerja	PNS	III/d	47	S-2
2.	Roisul Ehwan, S.H.	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman/Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman/Analis Perumahan	PNS	III/c	43	S-1
3.	Alwin Fahreza, S.Ars., M.Arch.	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus/ Penata Kelola Bangunan	PNS	III/c	32	S-2

		Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda				
4.	Ir. Arisha Yustina, S.Ars	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar/ Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	PNS	III/b	32	S-1
5.	Eka Firta Puspitasari, S.E., M.Ak.	Bendahara Pengeluaran/ Pranata Keuangan APBN Penyelia	PNS	III/c	40	S-2
6.	Febriananto Usop, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	CPNS	III/a	30	S-1
7.	Putra Natal Ginting, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	CPNS	III/a	29	S-1
8.	Dwi Yudha Haryanto, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	CPNS	III/a	25	S-1
9.	Yegar Sahaduta Manurung, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	CPNS	III/a	23	S-1
10.	Nany Susanty sri Wahyuni, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	PPPK	IX	36	S-1
11.	Agung Nugroho, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPPK	IX	37	S-1
12.	Gunadi Darmawan, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPPK	IX	36	S-1
13.	Ester Yuliana Kajenta, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PPPK	IX	36	S-1
14.	Maria Magdalena Uda, S.T.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	PPPK	IX	31	S-1
15.	Rangga Paranandeng, S.H.	Arsiparis Ahi Pertama	PPPK	IX	42	S-1
16.	Ahirno, S.Pd	Penata Layanan Operasional	PPPK	IX	36	S-1
17.	Rudy Tuhas	Operator Layanan Operasional	PPPK	V	55	SMA
18.	Devi Agustino Lumeno	Pengeolal Umum Operasional	PPPK	I	54	SD

Berikut ini adalah proporsi pegawai berdasarkan: a) status kepegawaian dan golongan, b) jenjang pendidikan dan c) usia dan gender di Lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

A. Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan

Berdasarkan status kepegawaian dan golongan yang terlihat pada **Tabel 3. 1**, Pegawai ASN dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 5 (lima) orang didominasi oleh golongan III/c sebanyak 3 (tiga) orang sebesar 17% yang diikuti oleh golongan III/d dan III/b masing-masing 1 (satu) orang dengan persentase sebesar 6%.

Pegawai ASN dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 4 (empat) orang seluruhnya diisi golongan III/a dengan persentase sebesar 22%.

Pegawai ASN dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 9 (sembilan) orang pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman didominasi Golongan/Grade IX sebanyak 7 (tujuh) orang dengan persentase 33% diikuti

oleh Golongan/Grade V dan Golongan/Grade I masing-masing 1 (satu) orang dengan masing- masing persentase 6%.

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan

Golongan	III/d (PNS)	III/c (PNS)	III/b (PNS)	III/a (CPNS)	IX (PPPK)	V (PPPK)	I (PPPK)	Total
Jumlah	1	3	1	4	7	1	1	**18**

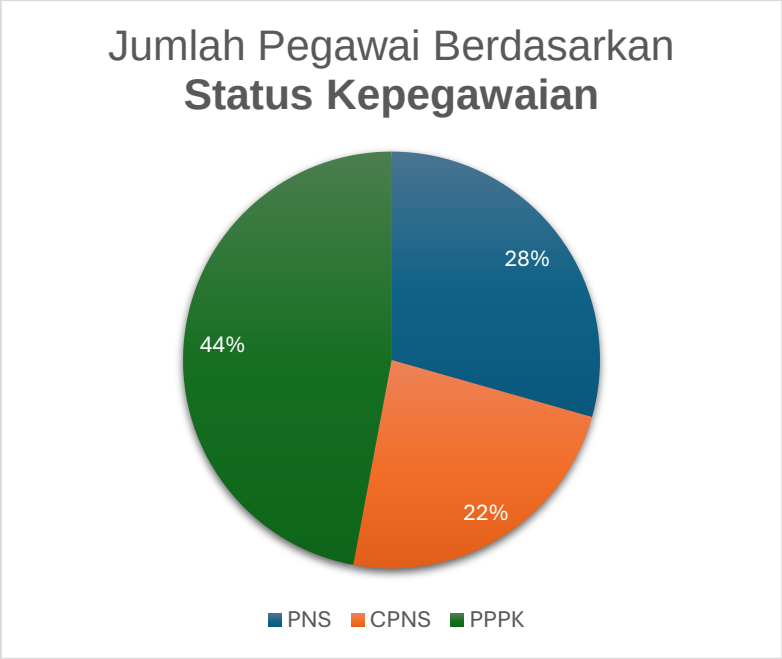

Gambar 3. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

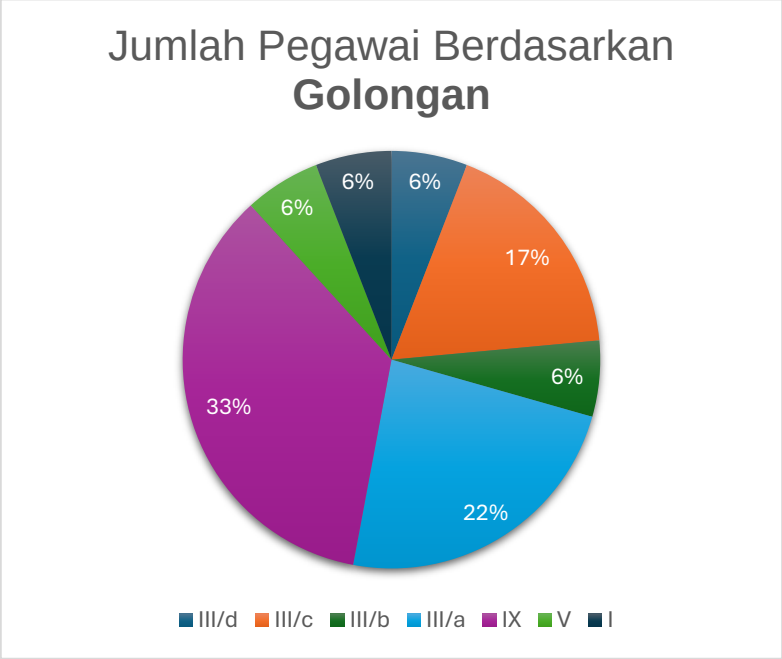

Gambar 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai (lihat **Tabel 3. 5** dan **Gambar 3. 4**), Pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan S-1 dengan dominasi sebanyak 13 (tiga belas) pegawai atau sebesar 72%. Kemudian pegawai dengan latar belakang pendidikan pegawai berlatar belakang pendidikan S-2 sebanyak 3 (tiga) orang dengan persentase sebesar 17%, disusul dengan pegawai berlatar belakang SD dan SMA masing-masing sebanyak 1 (satu) orang atau masing-masing sebesar 6%.

Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Status Pegawai	Jenjang Pendidikan (Orang)				Total
	SD	SMA	S-1	S-2	
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	0	2	3	5
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0	0	4	0	4
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1	1	7	0	9
Total	**1**	**1**	**13**	**3**	**18**

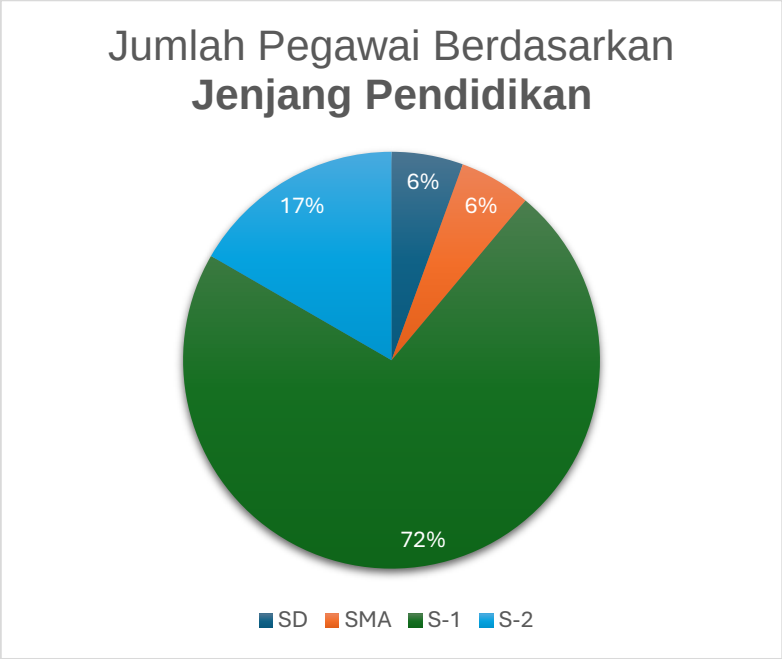

Gambar 3. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia dan Gender

Berdasarkan usia (lihat **Tabel 3.4** dan **Gambar 3.5)**, Pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh kelompok usia 31 s.d 40 tahun berjumlah 9 (sembilan) orang atau sebesar 50% diikuti oleh kelompok usia ≤ 30 tahun berjumlah 4 (empat) orang atau sebesar 22% sedangkan usia 41 sampai dengan 50 tahun berjumlah 3 (tiga) orang atau sebesar 17% dan kelompok rentang usia 51 sampai dengan 60 tahun sebanyak 2 (dua) orang sebesar 11%.

Berdasarkan jenis kelamin/gender (lihat **Tabel 3.5** dan **Gambar 3.6**), Pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh

gender laki-laki yang berjumlah 12 (dua belas) orang atau sebesar 67% dan pegawai perempuan berjumlah 6 (enam) orang atau sebesar 33%.

Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Status Pegawai	Usia (Orang)				Total
	≤ 30	31-40	41-50	51-60	
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	3	2	0	5
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	4	0	0	0	4
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0	6	1	2	9
Total	**4**	**9**	**3**	**2**	**18**

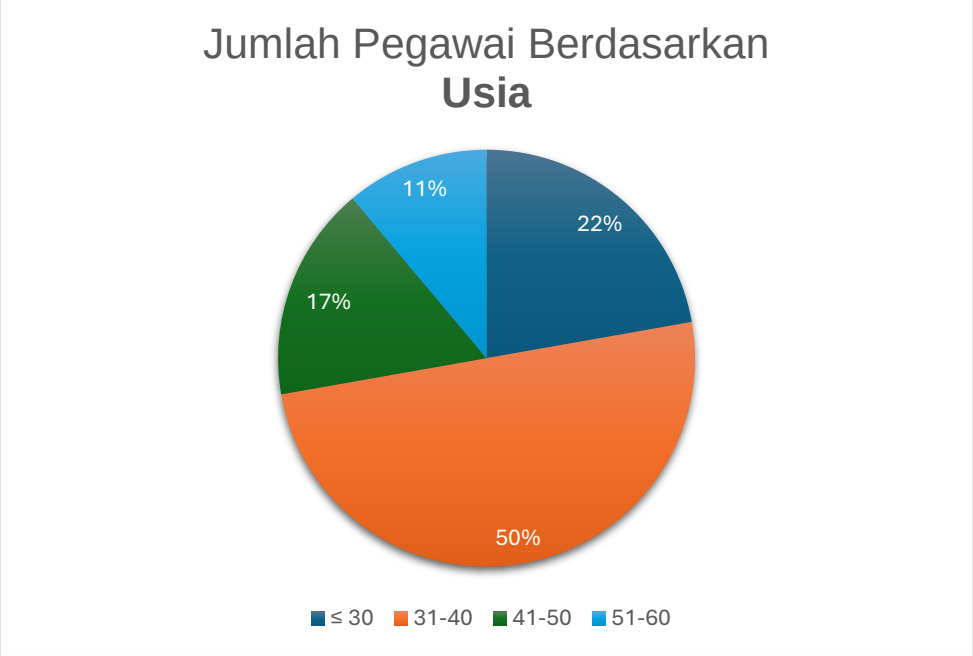

Gambar 3. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel 3. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

Status Pegawai	Gender (Orang)		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	3	5
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	4	0	4
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	6	3	9
Total	**12**	**6**	**18**

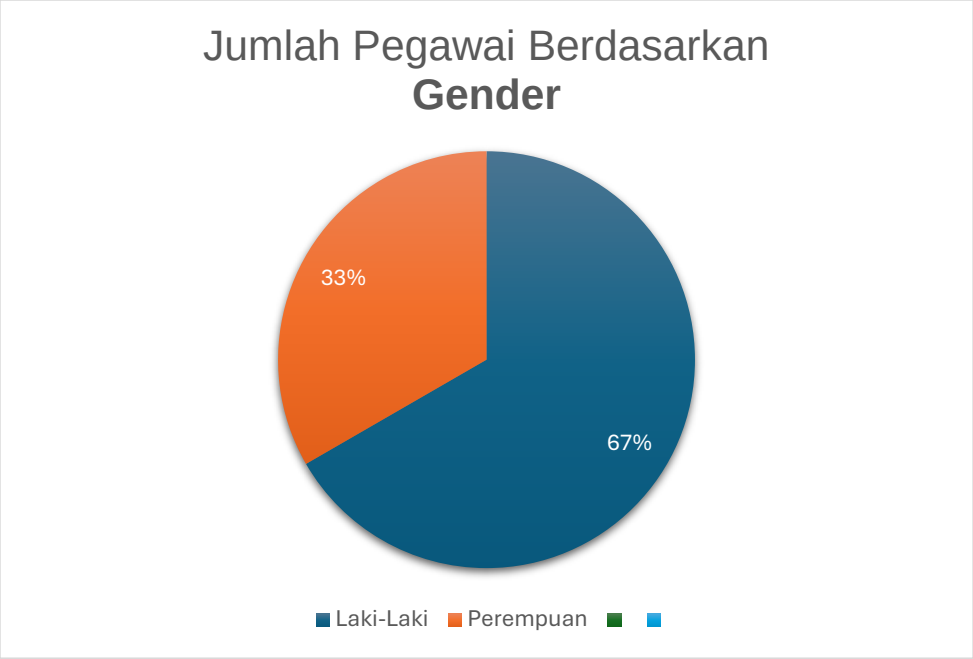

Gambar 3. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

3.3.2. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Sekretariat Jenderal

Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program/kegiatan Sekretariat Jenderal pada Tahun Anggaran 2025 meliputi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I yang diperbantukan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) orang dengan persyaratan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan bukan merupakan Pejabat Perbendaharaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3. 6 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan
1.	Endro Santosa, S.T.	Kepala Seksi Wilayah II BP3KP Kalimantan I	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 3. 7 Pegawai Outsourcing Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Adrian Yusa, S.Kom	Pramubakti	Perempuan
2.	Adi	Pramubakti	Laki-Laki
3.	Nurjanah	Petugas Kebersihan	Laki-Laki
4.	Muhammad Rizqy Azima	Petugas Kebersihan	Laki-Laki
5.	Rahmad	Satpam	Laki-Laki

3.3.3. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam

program/kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Deliniasi Perdesaan sebanyak 624 Unit di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 meliputi Tenaga Ahli Pendampingan BSPS, Koordinator Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Tenaga Ahli Pendampingan Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Richard Erison, SP	Tenaga Ahli Pemberdayaan	Laki-Laki	55	S-1 Pertanian

Tabel 3. 9 Koordinator Kabupaten Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Nama	Jabatan	Unit	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Lia Hestisia, S.T.	Koordinator Kabupaten Barito Selatan	107	Perempuan	36	S-1 Teknik
2.	Abdul Khair, S.Pd.I.	Koordinator Kabupaten Kapuas	97	Laki-Laki	37	S-1 Pendidikan Agama Islam
3.	Syariffudin, S.P.	Koordinator Kabupaten Kotawaringin Barat	291	Laki-Laki	26	S-1 Pertanian
4.	Indra Aji Sulaksa, S.T.	Koordinator Kabupaten Kotawaringin Timur	86	Laki-Laki	32	S-1 Teknik Sipil
5.	Kristin Monika, S.T.	Koordinator Kabupaten Sukamara	43	Perempuan	32	S-1 Arsitektur

Tabel 3. 10 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Andreas Maleh MP. Narang, S.IP	TFL Pemberdayaan Kabupaten Barito Selatan	Laki-Laki	26	S-1 Ilmu Pemerintahan
2.	Sisca Anjelina F. W., A.Md.AK	TFL Pemberdayaan Kabupaten Barito Selatan	Perempuan	22	D-III Analis Kesehatan
3.	Audy Mirelia Wirly Sompotan, S.Ars	TFL Teknik Kabupaten Barito Selatan	Peempuan	22	S-1 Teknik Arsitektur
4.	Azumiotry, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Barito Selatan	Laki-Laki	28	S-1 Teknik Arsitektur
5.	Tonny Hartanto, S.Pd	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kapuas	Laki-Laki	40	S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
6.	Riko Abrianto D. Bangas, SH	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kapuas	Laki-Laki	36	S-1 Ilmu Hukum
7.	Anugrah Prokritas, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kapuas	Laki-Laki	33	S-1 Teknik Arsitektur
8.	Heru Goestomo, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kapuas	Laki-Laki	45	S-1 Teknik Sipil
9.	Nugroho Setyobudi, Sp.	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	28	S-1 Pertanian
10.	Muhammad Amin, S.Pd	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	30	S-1 Pendidikan
11.	Sufriadi, SE	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	35	S-1 Ekonomi
12.	Matrasul, S.H.	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	26	S-1 Hukum

13.	Putri Pusvita Sari, S.AP	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Perempuan	23	S-1 Administrasi Pemerintahan
14.	Muchamad Hasan Alfadhin, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	48	S-1 Teknik Sipil
15.	Desi Kristina Tampubolon, S.Ars.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Perempuan	26	S-1 Arsitektur
16.	Muhammad Rizaldy Alradjasa, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	23	S-1 Teknik Sipil
17.	Ardi Pratama Syahputra, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	29	S-1 Teknik Sipil
18.	Devis Dwi Yuslye, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	29	S-1 Teknik Sipil
19.	Adhinugroho Setiawan, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	41	S-1 Teknik Sipil
20.	Muhammad Nizar Wiratama, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Barat	Laki-Laki	26	S-1 Teknik Sipil
21.	Wulan Cindy, S.Ikom	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Timur	Perempuan	24	S-1 Ilmu Komunikasi
22.	Saprudin, S.P.	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Timur	Laki-Laki	47	S-1 Pertanian
23.	Rishma Yudistira Ralasandi, S.M.	TFL Pemberdayaan Kabupaten Kotawaringin Timur	Laki-Laki	25	S-1 Manajemen
24.	Evitriana Dessy Pertiwi, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Kotawaringin Timur	Perempuan	28	S-1 Teknik Sipil
25.	Cuncun, S.T.	TFL Teknik Kabupaten Sukamara	Laki-Laki	48	S-1 Teknik Sipil
26.	Harjono, S.Ars	TFL Teknik Kabupaten Sukamara	Laki-Laki	28	S-1 Teknik Arsitektur

3.3.4. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program/kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Deliniasi Perkotaan sebanyak 244 Unit di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 meliputi Tenaga Ahli Pendampingan BSPS, Koordinator Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Tenaga Ahli Pendampingan Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Fristatesa Andriani, S.T., M.Ars.	Tenaga Ahli Konstruksi	Perempuan	32	S-2 Arsitektur

Tabel 3. 12 Koordinator Kota Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No.	Nama	Jabatan	Unit	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Dedy Priantony, S.T.	Koordinator Kota Palangka Raya	244	Laki-Laki	30	S-1 Teknik Arsitektur

Tabel 3. 13 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Novia Firtasari, S.AN	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Perempuan	29	S-1 Administrasi Negara
2.	Syafira Amajida Hermawan, S.H.	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Perempuan	28	S-1 Ilmu Hukum
3.	Khusnul Khotimah, S.Pd.	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Perempuan	24	S-1 Pendidikan
4.	Indra Partana Tumon, SP	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Laki-Laki	51	S-1 Pertanian
5.	Tri Dwi Agustina, S.H.	TFL Pemberdayaan Kota Palangka Raya	Perempuan	42	S-1 Ilmu Hukum
6.	Grace Tessa Novita, S.T.	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Perempuan	31	S-1 Teknik Arsitektur
7.	Vivi Sevianti, S.T.	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Perempuan	35	S-1 Teknik Arsitektur
8.	Stephany Christifenya, S.Ars	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Perempuan	25	S-1 Teknik Arsitektur
9.	Alvin Arifin, S.T.	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Laki-Laki	27	S-1 Teknik Sipil
10.	Rivaldo Imanuel, S.T.	TFL Teknik Kota Palangka Raya	Laki-Laki	24	S-1 Teknik Sipil

3.3.5. Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program Pembangunan Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 meliputi Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi untuk kegiatan Supervisi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
1.	Bagus Noorindra Setiawan, S.T.	Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi	Laki-Laki	43	S-1 Arsitektur
2.	Yulianna Theresia, S.T.	Tenaga Pendukung Bantuan Sanitasi	Perempuan	43	S-1 Perencanaan Wilayah Kota

BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target Kinerja 2025-2029 pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi 4 (empat) berdasarkan jumlah DIPA, yaitu meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Secara garis besar total target kinerja dalam rentang tahun 2025 hingga tahun 2029 untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebanyak 17.192 (Tujuh Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/ Laporan/ Kegiatan/ Unit/ Hektar. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen yaitu ditetapkan target kinerja sebesar 31 (Tiga Puluh Satu) Layanan. Berikut ini gambaran mengenai target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah:

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Matriks Target Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN			2025 - 2029	
			TARGET	SATUAN
PROGRAM		**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**17,192**	**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit**
Sasaran Program:		**Meningkatnya Hunian Layak**	**17,172**	**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan**
K 1		**Penyelenggaraan Sistem dan strategi**	**10**	**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan**
SK 1		**Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**10**	**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan**
	OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	-	Rekomendasi Kebijakan
	OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	-	Dokumen

	OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan
	OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	-	Laporan
	OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	Kegiatan
	OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	Rekomendasi Kebijakan
	OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	Dokumen
	OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	5	Laporan
	OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	-	Rekomendasi Kebijakan
	OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	4	Laporan
K 2		**Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum**	**1,140**	**Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan**
SK 2		**Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**1,140**	**Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan**
	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	1,140	Unit
	OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	-	Unit
	OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	-	Laporan
	OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	-	Dokumen
	OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	-	Dokumen
	OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	-	Dokumen
	OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan	-	Rekomendasi Kebijakan

		dan penghunian di bidang perumahan perkotaan		
K 3		**Penyediaan Rumah Layak Huni**	**16,022**	**Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan**
SK 3		**Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni**	**16,022**	**Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan**
	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya	14,317	Unit
	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	1,512	Unit
	OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun	192	Unit
	OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	-	Laporan
	OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	-	Laporan
	OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-	Laporan
	OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-	Rekomendasi Kebijakan
	OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	-	Laporan
	OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	1	Laporan
	OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	-	Rekomendasi Kebijakan
	OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	-	Rekomendasi Kebijakan
K 4		**Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**	**-**	**Rekomendasi Kebijakan**
SK 4		**Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**-**	**Rekomendasi Kebijakan**
	OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	-	Rekomendasi Kebijakan
Sasaran Program:		**Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**	**20**	**Hektar**
K 1		**Penanganan Permukiman Kumuh**	**20**	**Hektar**
SK 1		**Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu**	**20**	**Hektar**
	OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	20	Hektar

Sasaran Program:		**Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**	**-**	**Laporan**
K 1		**Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**Laporan**
SK 1		**Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman**	**-**	**Laporan**
	OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	-	Laporan
SK 2		**Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel**	-	Rekomendasi Kebijakan
	OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	-	Rekomendasi Kebijakan
SK 3		**Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**	**-**	**Rekomendasi Kebijakan**
	OK 1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	-	Rekomendasi Kebijakan
	OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	-	Rekomendasi Kebijakan
PROGRAM		**DUKUNGAN MANAJEMEN**	**31**	**Layanan**
Sasaran Program:		**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**31**	**Layanan**
K 1		**Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**31**	**Layanan**
SK 1		**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**31**	**Layanan**
	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	5	Layanan
	OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	5	Layanan
	OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	4	Layanan
	OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	4	Layanan
	OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan

OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	5	Layanan
OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	-	Layanan
OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-	Layanan
OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	Layanan
OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	-	Layanan
OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	Layanan
OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan target kinerja kegiatan 2025-2029 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah ditetapkan sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, maka telah ditetapkan juga alokasi alokasi kebutuhan pendanaan 2025-2029 untuk mendukung pencapaian target-target tersebut. Secara garis besar total kebutuhan pendanaan dalam rentang tahun 2025 hingga tahun 2029 untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar Rp 1.513.212.906.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) dan untuk Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp 100.982.814.000,- (Seratus Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Rincian kerangka pendanaan untuk masing-masing output kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Kerangka Pendanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN		2025 - 2029
		PENDANAAN (Rp Ribu)
PROGRAM	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1,513,212,906**
Sasaran Program:	**Meningkatnya Hunian Layak**	**1,464,812,906**
K 1	**Penyelenggaraan Sistem dan strategi**	**1,507,440**
SK 1	**Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**1,507,440**

	OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	-
	OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	-
	OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	38,472
	OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	-
	OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-
	OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	-
	OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-
	OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1,165,461
	OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	-
	OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	303,508
K 2		**Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum**	**17,873,869**
SK 2		**Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**17,873,869**
	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	17,873,869
	OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	-
	OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	-
	OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	-
	OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	-
	OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	-
	OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	-
K 3		**Penyediaan Rumah Layak Huni**	**1,445,431,597**
SK 3		**Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni**	**1,445,431,597**
	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya	377,786,050
	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	690,138,569
	OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun	376,771,892
	OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	-

	OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	-
	OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-
	OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-
	OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	-
	OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	735,086
	OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	-
	OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	-
K 4		**Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**	**-**
SK 4		**Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**-**
	OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	-
Sasaran Program:		**Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**	**48,400,000**
K 1		**Penanganan Permukiman Kumuh**	**48,400,000**
SK 1		**Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu**	**48,400,000**
	OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	48,400,000
Sasaran Program:		**Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**	**-**
K 1		**Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**
SK 1		**Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman**	**-**
	OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	-
SK 2		**Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel**	-
	OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	-
SK 3		**Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**	**-**
	OK 1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	-
	OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	-
PROGRAM		**DUKUNGAN MANAJEMEN**	**100,982,814**

Sasaran Program:		**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**100,982,814**
K 1		**Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**100,982,814**
SK 1		**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**	**100,982,814**
	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	98,424,562
	OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	189,711
	OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	299,172
	OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	487,780
	OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	303,508
	OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	844,499
	OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	-
	OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-
	OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-
	OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	-
	OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-
	OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	433,582

BAB 5
PENUTUP

BAB 5 PENUTUP

Dokumen Perencanaan/Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun untuk mendukung Rencana Strategis 4 (empat) Unit Organisasi yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai arahan operasional bagi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Priovinsi Kalimantan Tengah di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengemban visi, misi dan sasaran yang harus dicapai oleh masing-masing unit organisasi.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadlian dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode tahun 2025-2029 akan dilaksanakan beberapa program yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen.

Adapun Alokasi pendanaan untuk Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan target kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebanyak 17.192 (Tujuh Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Rekomendasi Kebijakan/Dokumen/Laporan/ Kegiatan/Unit/Hektar yaitu dengan kerangka pendanaan senilai Rp 1.513.212.906.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) dan untuk Program Dukungan Manajemen dengan target kinerja sebanyak 31 (tiga puluh satu) layanan dengan kerangka pendanaan senilai Rp 100.982.814.000,- (Seratus Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Proses pencapaian sasaran, target program dan kegiatan dalam Renstra memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan, agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal serta mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan yang optimal. Akhir kata, Dokumen Perencanaan/Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 perlu dijabarkan dalam Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

Evaluasi Renstra dilaksanakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran capaian indikator kinerja utama, indikator program, dan indikator kegiatan dengan membandingkan target dan

realisasi kinerja. Proses evaluasi mencakup pengumpulan dan verifikasi data, analisis capaian dan kesenjangan kinerja, serta penilaian konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Adapun pengukuran dan hasil evaluasi Renstra digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program, penyesuaian strategi dan kebijakan, serta penyusunan perencanaan periode berikutnya, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kinerja organisasi yang juga dilaporkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), baik triwulan maupun tahunan. Dengan mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja, pelaksanaan Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 – 2029 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

MATRIKS KINERJA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	*-2*	*-3*		*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*	*-14*	*-15*
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit, Hektar**		**680**	**4,123**	**4,123**	**4,123**	**4,143**	**17,192**	**55,353,574**	**332,864,139**	**342,742,894**	**358,842,553**	**423,409,746**	**1,513,212,906**
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:															
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi		**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**10**	**144,488**	**314,347**	**331,322**	**349,213**	**368,071**	**1,507,440**
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I		Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan		2	2	2	2	2	**10**	144,488	314,347	331,322	349,213	368,071	**1,507,440**
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen		-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan		1	-	-	-	-	**1**	38,472	-	-	-	-	**38,472**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			1	-	-	-	-	1	38,472	-	-	-	-	38,472
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan		-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan		-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen		-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan		1	1	1	1	1	**5**	106,016	244,347	257,542	271,449	286,107	**1,165,461**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			1	1	1	1	1	5	106,016	244,347	257,542	271,449	286,107	1,165,461
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	BP3KP Kalimantan I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		-	1	1	1	1	**4**	-	70,000	73,780	77,764	81,963	**303,508**
	BP3KP Kalimantan I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Satker Provinsi Kalimantan Barat			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah			-	1	1	1	1	4	-	70,000	73,780	77,764	81,963	303,508

KEGIATAN: **Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum**		**Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan**	**-**	**285**	**285**	**285**	**285**	**1,140**	**-**	**4,177,226**	**4,343,650**	**4,543,358**	**4,809,635**	**17,873,869**
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I		Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	-	285	285	285	285	**1,140**	-	4,177,226	4,343,650	4,543,358	4,809,635	**17,873,869**
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	285	285	285	285	**1,140**	-	4,177,226	4,343,650	4,543,358	4,809,635	**17,873,869**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	285	285	285	285	1,140	-	4,177,226	4,343,650	4,543,358	4,809,635	17,873,869
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN: **Penyediaan Rumah Layak Huni**		**Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan**	**678**	**3,836**	**3,836**	**3,836**	**3,836**	**16,022**	**55,209,086**	**328,372,565**	**338,067,923**	**353,949,982**	**369,832,041**	**1,445,431,597**
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	678	3,836	3,836	3,836	3,836	**16,022**	55,209,086	328,372,565	338,067,923	353,949,982	369,832,041	**1,445,431,597**
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	661	3,414	3,414	3,414	3,414	**14,317**	22,474,000	82,644,405	86,766,810	90,889,215	95,011,620	**377,786,050**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		661	3,414	3,414	3,414	3,414	14,317	22,474,000	82,644,405	86,766,810	90,889,215	95,011,620	377,786,050
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	378	378	378	378	**1,512**	-	162,897,068	167,775,913	175,747,167	183,718,421	**690,138,569**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	378	378	378	378	1,512	-	162,897,068	167,775,913	175,747,167	183,718,421	690,138,569
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	16	44	44	44	44	**192**	32,000,000	82,831,092	83,525,200	87,313,600	91,102,000	**376,771,892**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		16	44	44	44	44	192	32,000,000	82,831,092	83,525,200	87,313,600	91,102,000	376,771,892
4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	1	-	-	-	-	**1**	735,086	-	-	-	-	**735,086**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		1	-	-	-	-	1	735,086	-	-	-	-	735,086
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KEGIATAN: **Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**		**Rekomendasi Kebijakan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu													
SASARAN PROGRAM: **Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**														
KEGIATAN: **Penanganan Permukiman Kumuh**		**Hektar**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.00**	**20.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,400,000**	**48,400,000**
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		Hektar	-	-	-	-	20.00	**20.00**	-	-	-	-	48,400,000	**48,400,000**
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	-	-	-	20.00	**20.00**	-	-	-	-	48,400,000	**48,400,000**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	20.00	20.00	-	-	-	-	48,400,000	48,400,000
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN **SASARAN STRATEGIS 2:** **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**Layanan**	**3**	**7**	**7**	**7**	**7**	**31**	**7,720,431**	**21,635,881**	**22,719,081**	**23,856,517**	**25,050,905**	**100,982,814**
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman													
SASARAN PROGRAM: **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**														
KEGIATAN: **Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**		**Layanan**	**3**	**7**	**7**	**7**	**7**	**31**	**7,720,431**	**21,635,881**	**22,719,081**	**23,856,517**	**25,050,905**	**100,982,814**
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I		Layanan	3	7	7	7	7	**31**	7,720,431	21,635,881	22,719,081	23,856,517	25,050,905	**100,982,814**
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	1	1	1	**5**	7,689,757	21,051,548	22,104,126	23,209,332	24,369,799	**98,424,562**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		1	1	1	1	1	5	7,689,757	21,051,548	22,104,126	23,209,332	24,369,799	98,424,562
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	1	1	1	**5**	12,565	41,100	43,155	45,313	47,578	**189,711**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		1	1	1	1	1	5	12,565	41,100	43,155	45,313	47,578	189,711
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	**4**	-	69,000	72,726	76,653	80,792	**299,172**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	1	1	1	1	4	-	69,000	72,726	76,653	80,792	299,172
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	**4**	-	112,500	118,575	124,978	131,727	**487,780**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	1	1	1	1	4	-	112,500	118,575	124,978	131,727	487,780
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	**4**	-	70,000	73,780	77,764	81,963	**303,508**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	1	1	1	1	4	-	70,000	73,780	77,764	81,963	303,508
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	1	1	1	**5**	18,109	191,732	201,319	211,385	221,954	**844,499**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		1	1	1	1	1	5	18,109	191,732	201,319	211,385	221,954	844,499
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	**4**	-	100,000	105,400	111,092	117,091	**433,582**
	Satker Provinsi Kalimantan Tengah		-	1	1	1	1	4	-	100,000	105,400	111,092	117,091	433,582

Lampiran 2 Metode Perhitungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

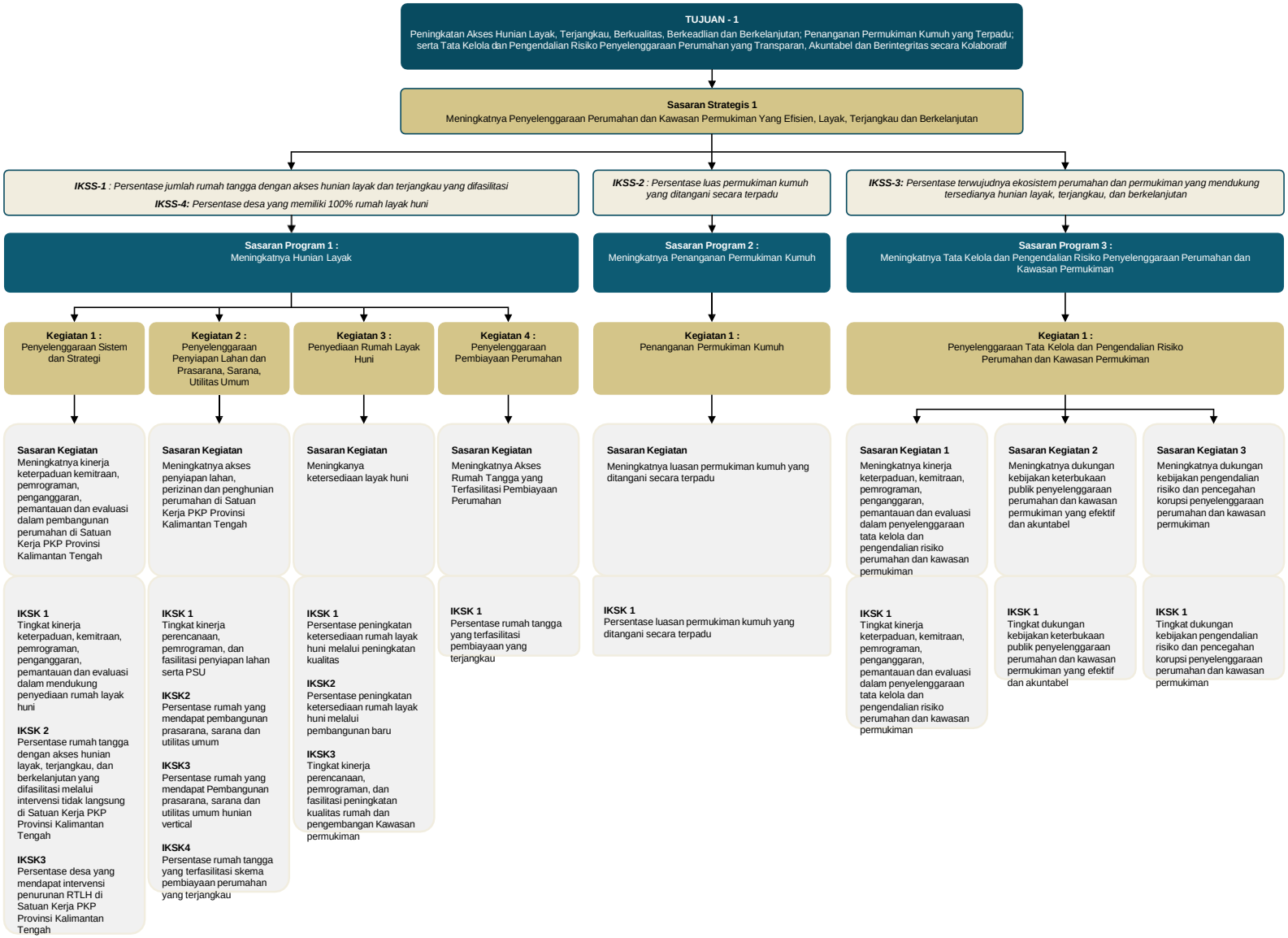

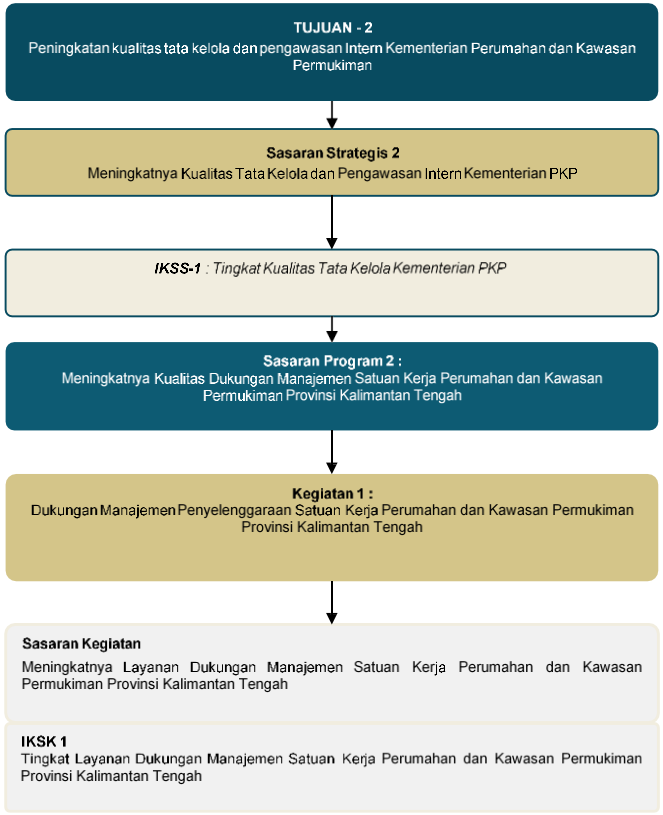
TUJUAN - 2
Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP
IKSS-1 : Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP
Sasaran Program 2 :
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan 1 :
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
IKSK 1
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

METODE PERHITUNGAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN STRATEGIS 1: **Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan**								
SASARAN PROGRAM 1: **Meningkatnya Hunian Layak**								
Kegiatan 1: **Penyelenggaraan Sistem dan Strategi**								
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	**IKSK 1**	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	**OK 1**	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 3 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2027: 0 kegiatan 2029: 0 kegiatan 2026: 0 kegiatan 2028: 0 kegiatan Total : 1 kegiatan	Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal

				OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: 3 laporan 2029: 3 laporan 2026: 3 laporan 2028: 3 laporan Total : 14 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 3 laporan 2029: 3 laporan 2026: 3 laporan 2028: 3 laporan Total : 12 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: **Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum**								
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	**IKSK 1**	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	**OK 1**	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 804 unit 2029: 804 unit 2026: 804 unit 2028: 804 unit Total : 3216 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	**OK 2**	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 0 unit 2029: 0 unit 2026: 0 unit 2028: 0 unit Total : 0 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	**OK 3**	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyiapan lahan dan PSU kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyiapan lahan dan PSU kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyiapan lahan dan PSU kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 0 dokumen 2029: 0 dokumen 2026: 0 dokumen 2028: 0 dokumen Total : 0 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 0 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 3 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal

				OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: **Penyediaan Rumah Layak Huni**								
SK 1	Meningkatnya ketersediaan layak huni	**IKSK 1**	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	**OK 1**	Jumlah unit rumah swadaya *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3.016 unit 2027: 7.856 unit 2029: 7.856 unit 2026: 7.856 unit 2028: 7.856 unit Total : 34.440 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	**OK 2**	Jumlah rumah khusus yang terbangun *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 1.426 unit 2029: 1.426 unit 2026: 1.426 unit 2028: 1.426 unit Total : 5.704 unit	Non Kumulatif	Internal
				OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 16 unit 2027: 88 unit 2029: 88 unit 2026: 88 unit 2028: 88 unit Total : 368 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	**OK 4**	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal

OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 3 laporan	Non Kumulatif	Internal
OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

				OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 4: **Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan**								
SK 1	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	**IKSK 1**	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	**OK 1**	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 2: **Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**								
Kegiatan 1: **Penanganan Permukiman Kumuh**								
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	**IKSK 1**	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	**OK 1**	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu *(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 15,00 Ha 2027: - Ha 2029: 20,00 Ha 2026: - Ha 2028: - Ha Total: 35.00 Ha	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: **Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**								
Kegiatan 1: **Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	**IKSK 3**	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	**OK 1**	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 Laporan	Non Kumulatif	Internal
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	**IKSK 3**	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	**OK 1**	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	**IKSK 3**	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	**OK 1**	Jumlah penerapan manajemen risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

				OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Dihitung dari realisasi jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
SASARAN STRATEGIS 2: **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
SASARAN PROGRAM 1: **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I**								
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I								
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	**IKSK 1**	Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	**OK 1**	Jumlah Layanan Perkantoran *(Sekretariat Jenderal)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah Layanan Umum *(Sekretariat Jenderal)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 3	Jumlah Layanan Umum *(Ditjen Kawasan Permukiman)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah Layanan Umum *(Ditjen Perumahan Perdesaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah Layanan Umum *(Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal *(Sekretariat Jenderal)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi *(Ditjen Kawasan Permukiman)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal

				OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi *(Ditjen Perumahan Perdesaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi *(Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah Layanan BMN *(Ditjen Kawasan Permukiman)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 11	Jumlah Layanan BMN *(Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja *(Ditjen Perumahan Perkotaan)*	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal

satker.kalteng@pkp.go.id

Jl. Gurame Putih I No. 07, Palangka Raya